

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Pembangunan nasional dan perkembangan perekonomian yang sangat pesat merupakan proses perubahan yang memberikan kebutuhan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu pemerintah sangat mengandalkan penerimaan dari sektor perpajakan sebagai tulang punggung penerimaan negara. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang tidak perlu dibayarkan kembali mempunyai prospek yang sangat mungkin untuk menjadi satu-satunya sumber utama penerimaan negara yang dapat diandalkan. Direktorat Jendral Pajak (DJP) berusaha meningkatkan penerimaan pajak diantaranya dengan cara meningkatkan jumlah Wajib Pajak (WP) terdaftar secara terus menerus dan dengan melakukan reformasi kebijakan perpajakan.

Pajak di gunakan sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, oleh karena itu pemungut pajak harus adil diselesaikan dengan kemampuan masing-masing. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 A. Karena pajak merupakan iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan imbalan jasa

(kontaprestasi) secara langsung yang di tujukan untuk pemabayaran pengeluaran umum. (Suryarini dan Tarmidji, 2012)

Sebagai warga negara Indonesia dibutuhkan kesadaran yang besar untuk membayar pajak yang merupakan salah satu perwujudan pengabdian sebagai wajib pajak. Membayar pajak dilandasi kesadaran bahwa dengan fasilitas negara, masyarakat Indonesia dapat melakukan kegiatan kegiatan usaha. Sesuai dengan arti pajak itu sendiri yaitu iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung, ditujukan dan diinginkan untuk memelihara kesejahteraan umum. (Soemitro, 2001)

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut juga dibutuhkan dukungan masyarakat maupun DPR agar koordinasi dengan setiap instansi maupun instansi pemerintah dapat lebih kuat, serta disebarkannya program kampanye sadar dan peduli pajak yang berkesinambungan dan merata serta program pelayanan pengembangan pelayanan perpajakan. Karena kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pelaksanaan program-program tersebut sehingga masih banyak wajib pajak yang belum tahu bagaimana melakukan perhitungan dan pelaporan pajak.

Sejak reformasi perpajakan pada tanggal 31 Desember 1983 yang di tetapkan dan menghasilkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbarui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, sistem pemungutan pajak di Indonesia berubah dari *official assessment* yaitu sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada pemerintah (petugas

pajak) untuk menentukan besarnya pajak terhutang wajib pajak, menjadi *self assessment* yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Upaya pemberdayaan masyarakat dari sistem melalui pelaksanaan sistem ini, perlu diikuti dengan tindakan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jendral Pajak serta diimbangi dengan kesadaran wajib pajak dalam rangka peningkatan penerimaan negara.

Pajak penghasilan (PPh) dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di peroleh dalam tahun pajak. Pajak penghasilan terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, dan PPh pasal 26.

Salah satu jenis pajak yang ditetapkan pemerintah adalah pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan dalam bagian tahun pajak. Ada beberapa jenis pajak penghasilan yang salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23. Salah satunya juga mengatur tentang pajak yang dikenakan pada penghasilan yang berasal dari modal atau hadiah, dan penyerahan jasa. Pajak penghasilan 23 adalah pajak yang di potong atas penghasilan yang berasal dari modal atau hadiah dan penyerahan jasa selain yang telah di potong pajak penghasilan pasal 21.

Pelaksanaan pajak penghasilan pasal 23 juga diterapkan pada PT Hutan Alam, pelaksanaan PPh pasal 23 yang ada pada PT Hutan Alam adalah PPh pasal 23 Atas jasa.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulisan tugas akhir ini mengangkat judul ***“PROSEDUR PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS JASA TEKNIK DI PT. HUTAN ALAM SURABAYA”***.

Judul tersebut perlu di ajukan agar dapat memahami lebih mendalam mengenai pelaksanaan prosedur pemotongan, pemungutan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 khususnya pada PT. Hutan Alam.

1.2 TUJUAN STUDI LAPANG

Penelitian dari penulisan laporan studi lapang mempunyai tujuan dan manfaat yang dilaksanakan di PT. Hutan Alam Surabaya yaitu untuk mengetahui tata cara pemotongan, mengetahui prosedur penyetoran, dan mengetahui prosedur pelaporan PPh pasal 23 di PT. Hutan Alam Surabaya.

1.3 MANFAAT STUDI LAPANG

Selain ingin tercapainya tujuan dari studi lapang, didalam laporan tugas akhir ini ada juga manfaat dari yang di peroleh untuk beberapa pihak yang terkait, yaitu :

1. Bagi Pembaca :

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 atas jasa teknik bagi pembaca yang berkepentingan, serta dapat dijadikan sebagai acuan referensi bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya (STIESIA).

2. Bagi Penulis :

Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai prosedur pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 23 jasa teknik di PT. Hutan Alam Surabaya.

3. Bagi Kantor PT Hutan Alam Surabaya :

Sebagai bahan yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi kantor untuk mengambil suatu keputusan yang dibutuhkan.

1.4 RUANG LINGKUP STUDI LAPANG

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya batasan ruang lingkup studi lapang. Hal ini dikarenakan luasnya kegiatan dalam bidang perpajakan terutama pajak penghasilan. Maka ruang lingkup studi lapang yang akan diambil pada tahun 2019 adalah tentang dasar pengenaan tarif PPh pasal 23 atas jasa teknik dan prosedur pemotongan, penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 23 atas jasa teknik di PT. Hutan Alam Surabaya.

1.5 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode Pengumpulan data merupakan proses pengadaan untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam rangkaian penulisan laporan agar dapat menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung jawabkan sehingga data yang diperoleh adalah data yang benar. Metode yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Observasi yaitu penulis akan melakukan pengamatan secara langsung pada

kantor PT. Hutan Alam Surabaya, serta mengumpulkan data yang terkait dengan prosedur pemotongan, pemungutan, dan pelaporan PPh pasal 23 di PT. Hutan Alam Surabaya. Lalu, dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan mempelajari dan mengkaji data transaksi jasa teknik yang berhubungan dengan bukti pemotongan PPh pasal 23 atas jasa tekknik di PT. Hutan Alam Surabaya. Dan wawancara yaitu dalam metode ini dapat diperoleh dan dikumpulkan sebuah data dengan melakukan suatu tanya jawab secara langsung dengan melakukan tanya jawab kepada bagian administrasi di PT. Hutan Alam Surabaya.

